

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR INTI DANA SENTOSA
TAHUN 2025



Jl P.Antasari No. 106B Bandar Lampung, Lampung
TELEPON: (0721)-251770



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	BPR Inti Dana Sentosa
Alamat	Jl.P.Antasari No. 106B Bandar Lampung, Lampung
Nomor Telepon	(0721)-251770

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di BPR Inti Dana pada Tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR Inti Dana Sentosa meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang Tahun 2024 di tengah persaingan yang sangat ketat.

BPR Inti Dana Sentosa memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Inti Dana Sentosa dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Lampung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Inti Dana Sentosa didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Inti Dana Sentosa.

BPR Inti Dana Sentosa telah beroperasi lebih dari 18 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Inti dana selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan

Di sepanjang 2025 dan untuk di Tahun-Tahun mendatang, BPR Inti dana Sentosa terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik
--	---------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	DEDE
	NIK	1871121712730003

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Direksi memiliki dan melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. Fungsi Audit Intern;
 - b. Fungsi Manajemen Risiko; dan c.
 - Fungsi Kepatuhan.
5. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2.	Nama	EKO PRAMONO
	NIK	1872012909680001

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Direksi memiliki dan melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. Fungsi Audit Intern;
 - b. Fungsi Manajemen Risiko; dan
 - c. Fungsi Kepatuhan
5. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain



7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Menindak lanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penggunaan KAP untuk Tahun buku 2025.
2. Menindak lanjuti penyampaian dokumen RBB 2026 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
3. Menindak lanjuti Hasil Temuan OJK 2025

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	OEY ALBERT
	NIK	3174051701740004
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :	
	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:<ol style="list-style-type: none">a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;danb. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :<ol style="list-style-type: none">a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;dan/ataub. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;	
2.	Nama	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN
	NIK	1871070704590005
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai	

kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
 - dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Rekomendasi Kepada Direksi:

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2025 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :

1. Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis BPR 2026 untuk dilaksanakan
2. Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit terhadap pengelolaan BPR untuk Tahun buku 2025.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	DEDE
	NIK	1871121712730003
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	EKO PRAMONO



NIK	1872012909680001
Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	OEY ALBERT
	NIK	3174051701740004
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN
	NIK	1871070704590005
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Dewan Direksi & Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	DEDE
	NIK	1871121712730003
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	EKO PRAMONO
	NIK	1872012909680001
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	OEY ALBERT
	NIK	3174051701740004
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN
	NIK	1871070704590005



Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	DEDE
	NIK	1871121712730003
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	EKO PRAMONO
	NIK	1872012909680001
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	OEY ALBERT
	NIK	3174051701740004
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN
	NIK	1871070704590005
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Nihil

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	DEDE
	NIK	1871121712730003



	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	EKO PRAMONO
	NIK	1872012909680001
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	OEY ALBERT
	NIK	3174051701740004
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN
	NIK	1871070704590005
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Nihil

Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi



10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	DEDE
	NIK	1871121712730003
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	EKO PRAMONO
	NIK	1872012909680001
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	OEY ALBERT
	NIK	3174051701740004
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	WIDARTO - ORANG TUA
2.	Nama	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN
	NIK	1871070704590005
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Nihil

Tidak ada hubungan keluarga sesama anggota Dewan Komisaris, namun komisaris utama ada hubungan keluarga dengan pemegang saham

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp813.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp312.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp279.890.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
---	-----

Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
--	-----

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
--	-----

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
---	-----

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan	Rp0
-----------------------------------	-----

Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Nihil

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 3,43 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 2,00 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,36 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 3,33 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 4,17 : 1

Nihil

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat	08 Januari 2025
------------------	-----------------



	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Pembahasan penunjukan AP dan/ atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan PT. BPR Inti Dana Sentosa tahun buku 2025 dan Penentuan/ penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi BPR IDS
2.	Tanggal Rapat	15 April 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Monitoring Rencana Bisnis BPR (RBB), Evaluasi dan langkah-langkah perbaikan jika perlu selama realisasi periode triwulan 1/2025, Tingkat kesehatan dan Issue/Topik strategis lainnya
3.	Tanggal Rapat	10 Juli 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Evaluasi pencapaian RBB triwulan 2/2025 (semester 1/2025), Monitoring dan Analisis atas Realisasi RBB tahun berjalan, kebijakan yang perlu dilakukan
4.	Tanggal Rapat	05 November 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Evaluasi pencapaian RBB triwulan 3/2025, Monitoring dan Analisis atas Realisasi RBB tahun berjalan, kebijakan yang dianggap perlu dilakukan, Topik strategis terkait lainnya.

Nihil

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	OEY ALBERT
	NIK	3174051701740004
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN
	NIK	1871070704590005
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Nihil

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Nihil

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang	0 kasus

Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian 4 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian 1 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Nihil

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR Inti Dana Sentosa untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 13 April 2026

BPR Inti Dana Sentosa

Disetujui,


Oey Albert
Komisaris Utama


DEDE
Direktur Utama